

	No. Alumni Universitas:	<b>FIGURA IHSANDO ERNESIA</b>	No Alumni Fakultas:
	a) Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 26 Februari 1994 b) Nama Orang Tua : Haynes Ade dan Rihafniyeti c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Perdata e) No. BP : 1110112105	f) Tanggal Lulus : 21 April 2016 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,24 i) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan j) Alamat: Komp. Villa Melati Mas Blok CC/5B Tabing, Padang	

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2006 TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN STUDI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A  
PADANG**

Figura Ihsandp Ernesia, 1110112105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 64 halaman

**ABSTRAK**

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen ke dalam dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, adanya upaya untuk pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK sehingga timbul pengaturannya dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK. Dalam penulisan ini penulis mengemukakan rumusan masalah, yakni 1) bagaimana pelaksanaan PERMA No.1 tahun 2006 di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang? 2) apa yang menjadi pertimbangan atau alasan Majelis Hakim untuk menerima atau tidak upaya keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa yang keberatan atas putusan BPSK dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan yang ada setelah berlakunya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006?. Adapun pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, yakni: Dalam pelaksanaan PERMA No.1 Tahun 2006 Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, berjalan dengan baik, tertib dan lancar, tidak di temukannya kendala-kendala yang terjadi semenjak setelah berlakunya PERMA tersebut. Adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis hakim dalam menerima dan mengadili sendiri adalah putusan yang dikeluarkan oleh BPSK adalah hal-hal yang dianggap mengambil kewenangan dari Pengadilan Negeri.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 21 April 2016.

Abstrak telah disetujui penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama	Neneng Oktarina, S.H., M.H	Linda Elmis, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: Prof. Dr. H. Yaswirman, MA.

\_\_\_\_\_  
Signature

Alumnus telah mendaftar ke fakultas / Universitas dan mendapat nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama:	Tanda tangan:
No. Alumni Universitas :	Name:	Tanda tangan:

